
**PERANAN LPTK DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN
DI BIDANG TATA BUSANA**

Oleh
Cornelia Bataragoa
Dosen Jurusan PKK FT UNIMA

I. Pendahuluan

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah suatu lembaga perguruan tinggi yang mempersiapkan tenaga pendidik profesional; termasuk tenaga pendidik SMK dan lebih khusus tenaga pendidik SMK kelompok parawisata bidang tata busana.

Pendidikan kejuruan (*Vocational Education*) merupakan pendidikan jenjang menengah yang diarahkan untuk membekali para siswa dengan bidang-bidang tertentu mereka dapat mengisi peluang dan menekuni pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

Penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam bidang (tata busana) adalah untuk menyiapkan peserta didik yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Para siswa dipersiapkan menjadi tenaga produktif dapat memenuhi tenaga kerja dunia usaha industri rumah tangga (*home industri*). Dengan demikian dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain. Pendidikan vokasi dalam pengembangannya mengubah status siswa dari ketergantungan menjadi bangsa yang berprestasi (produktif), sehingga mampu mengikuti, menguasai dan menyesuaikan diri dengan kemajuan IPTEK, dalam pengembangan diri secara berkelanjutan.

Peran LPTK dalam hal ini pendidikan vokasi antara lain tata busana kelompok parawisata (baik pada jenjang pendidikan menengah/ SMK maupun pendidikan tinggi). Membekali siswa / mahasiswa dengan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Olehnya LPTK mempersiapkan tenaga pendidik/ guru pendidik vokasi antara lain guru kelompok pariwisata bidang tata busana yang dapat mempersiapkan lulusan yang kompeten.

Tenaga pendidik teknologi dan kejuruan, khususnya tenaga pendidik bidang busana memerlukan penyiapan yang profesional agar tenaga pendidik ini dapat berkiprah sesuai harapan para *stakeholder*. Sekolah sangat mengharapkan memiliki guru-guru yang mempunyai keahlian di bidangnya, antara lain untuk guru-guru di bidang busana, baik guru sekolah menengah kejuruan (SMK), maupun untuk guru-guru pendidikan dasar. Terutama untuk SMK pariwisata yang di dalamnya ada jurusan tata busana sangat memerlukan bidang busana yang mempunyai wawasan luas, mendalam keahlian yang terfokus pada bidang- bidang busana yang diperlukan di pariwisata tersebut.

Guru SMK kelompok pariwisata bidang busana yang diharapkan adalah lulusan pendidikan tinggi yang mempunyai kualifikasi akademik diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) dari program pendidikan yang sesuai dan memiliki sertifikat profesi guru. Untuk guru SMK yang mengajar di bidang kejuruan berarti harus lulusan dari bidang kejuruan yang relevan, seperti yang tertuang pada Bab VI Pasal 29 ayat (6) tentang standar nasional pendidikan:

Pendidikan pada SMK / MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :

- Kualifikasi akademik pendidik minimum diploma empat (D IV) atau sarjana (S1);
- Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan; dan
- Sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Jadi untuk guru SMK kelompok parawisata bidang busana sesuai dengan aturan Standar Nasional Pendidikan tahun 2005 harus sesuai dengan aturan yang dikemukakan tersebut. Guru/pendidik kejuruan, khususnya bidang busana harus memiliki kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, membimbing, mendidik agar para peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan kejuruan yang telah dirumuskan, sehingga lulusan SMK pun dapat berkiprah secara berkualitas dalam bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Berbicara tentang tujuan pendidikan kejuruan tidak hanya menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja, tetapi banyak faktor lain yang perlu diperhatikan oleh seorang guru SMK seperti tergambar dari keputusan Mendikbud No. 0490/U/1990 yaitu :

Tujuan pendidikan kejuruan adalah : (a) mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan atau meluaskan pendidikan dasar; (b) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan sekitar; (c) meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan pengembangan ilmu, teknologi, dan keterampilan;

serta, (d) menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan sikap profesional.

Upaya untuk mencapai tujuan pendidikan kejuruan, maka guru harus memiliki kompetensi yang siap untuk mengarahkan, mendidik peserta didik di sekolah sehingga peserta didik dapat dibekali ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai bidangnya. Disamping itu yang paling utama tugas guru adalah mempersiapkan peserta didik agar mereka secara mental siap kerja, dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja secara sosial, budaya, dan lingkungan dimana peserta didik bekerja dan memiliki mental kewirausahaan. Kaitan dengan mental kewirausahaan yaitu bagaimana peserta didik, antara lain memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, maju, dapat membuat keputusan yang tepat, berani mengambil resiko, jujur, ulet, disiplin dan teliti.

Dari uraian tersebut diatas dapat tergambarkan bagaimana peran LPTK sebagai suatu lembaga yang ada pada perguruan tinggi, pemerintah perlu ada kebijakan terhadap pengembangan pendidikan vokasi (pendidikan kejuruan) khususnya pengembangan kewirausahaan bidang tata busana di Indonesia.

II. Peranan LPTK Dalam Pengembangan Pendidikan Tata Busana Dalam Konteks Pendidikan Kewirausahaan.

1. Pendidikan Kewirausahaan

Kewirausahaan dewasa ini sudah menjadi cabang ilmu yang mandiri dan diajarkan di sekolah-sekolah bergengsi. Sekolah-sekolah bisnis ini mengharapkan alumninya tidak hanya bekerja sebagai karyawan tetapi didorong untuk menjadi wirausaha. Wirausaha yang sukses walaupun tidak pernah sekolah bisnis sesungguhnya mereka belajar kewirausahaan dari keluarganya, lingkungan masyarakatnya ataupun dari tempatnya bekerja sebelumnya. Shefky (1994) misalnya memberi judul bukunya *Entrepreneurs are made not born: secret from 200 succesful entrepreneurs*. Ia berpendapat bahwa wirausaha berasal dari hasil belajar dari lingkungan dan pengalaman disamping sekolah.

Menurut Bygarave (dalam Sagala 2008:188) dengan berkembangnya seni dan sains kewirausahaan. Karakteristik wirausaha dan proses kewirausahaan dapat diketahui. Oleh karena itu kewirausahaan dapat dididik. Akan tetapi sekolah bisnis tidak menjamin akan mampu menghasilkan wirausahawan. Jika sekolah bisnis dari mahasiswa yang mempunyai sikap untuk mendirikan bisnis akan berhasil membuat wirausaha yang lebih baik. Jadi dapat dimaknai bahwa wirausaha termasuk kepemimpinan wirausaha kepala sekolah yang dilahirkan melalui proses pendidikan.

Di negara-negara maju di benua Amerika Serikat dan Eropa pendidikan kewirausahaan berkembang dengan pesat. Mata kuliah kewirausahaan diberikan pada program undergraduate maupun graduate. Sejumlah program studi bisnis mempunyai konsentrasi pada bidang kewirausahaan. Di Eropa Timur dengan tumbangannya pemerintahan komunis dan berkembangnya perusahaan individu yang berorientasi pada pasar dengan menanamkan jiwa wirausaha, pendidikan formal dan nonformal. Sementara itu di Indonesia mata pelajaran / mata kuliah kewirausahaan diberikan di sekolah menengah kejuruan dan sejumlah program S1 dan S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ekonomi dan Program studi Magister Manajemen. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 kewirausahaan diinstruksikan untuk diberikan di semua pendidikan formal dan non formal.

Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan kewirausahaan para mahasiswa yang dimungkinkan pada suatu waktu akan menjadi kepala sekolah dengan menyusun program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Program tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan Tujuan dari pendidikan kewirausahaan adalah untuk memahami :

- 1) Karakteristik kewirausahaan dalam memimpin sekolah dan menguasai teknik bagaimana mengubah mentalitas, sikap dan perilaku diri orang agar memiliki karakteristik tersebut.
- 2) Pengertian kreativitas dan inovasi dan bagaimana agar menjadi kreatif dan inovatif
- 3) Peran sekolah terutama bagi kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan terdidik
- 4) Proses kewirausahaan, perencanaan dan pengembangan produk serta proses pendirian unit-unit baru dalam mengembangkan sekolah
- 5) Teknik memahami, mengidentifikasi dan menganalisis peluang peningkatan mutu pendidikan
- 6) Sumber-sumber pembaruan teknologi pendidikan dan manajemen sekolah
- 7) Teknik menyusun proposal

- 8) Teknik manajemen pembelajaran: pengembangan produk, pemasaran produk, memperoleh sumber-sumber usaha dan keuangan dan akuntansi; dan
- 9) Prinsip-prinsip bisnis yang diterapkan untuk usaha sekolah jenis materi keterampilan yang diajarkan dalam pendidikan dan pelatihan kewirausahaan menurut Wirawan (dalam Sagala 2008 : 188) antara lain:
Teknik mendirikan usaha baru meliputi : (1) mencari ide peluang bisnis ; (2) Menentukan jenis usaha, produk, tempat usaha, dan mitra usaha; (3) mengidentifikasi sumber-sumber bisnis; (4) Menyusun rencana, proposal bisnis ; (5) Membangun tempat usaha dan peralatan, dan (6) Mengorganisir usaha.

Studi komparatif bisnis meliputi : (1) pengembangan produk; (2) teknik pemasaran; (3) sumber-sumber keuangan; (4) aliran kas; (5) akuntansi keuangan; (6) manajemen sumber daya manusia (7) teknik pengontrolan; (8) teknik negosiasi dan komunikasi (9) kepemimpinan, dan (10) manajemen bisnis yang islami.

Bygrave (dalam Sagala 2008: 188) menggambarkan beberapa karakteristik dari wirausahaan yang memiliki sifat-sifat yang di kenal dengan istilah 10 D yakni : (1) *dream*, yaitu seorang wirausahawan mempunyai visi bagaimana keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan bisnisnya itu, (2) *decisiveness*, yaitu tidak bekerja secara lambat, membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan, hal ini merupakan faktor kunci (key factor) sukses bisnisnya, (3) *doers*, yaitu menindaklanjuti keputusan, melaksanakan kegiatannya secepat mungkin yang dia sanggup, artinya tidak mau menunda nunda kesempatan yang dapat dimanfaatkannya, (4) *determination* yaitu melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab tinggi dan tidak mau menyerah begitu saja walaupun dihadapkan pada halangan dan rintangan yang tidak mungkin diatasi; (5) *dedication*, yaitu bekerja tidak mengenal lelah 12 Jam sehari 7 hari dalam satu minggu, perhatian dan kegilaannya dipusatkan pada bisnisnya; (6) *devotion*, yaitu kegembiraan dan kegila-gilaan dalam mencintai bisnisnya, ia mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkannya; (7) *details*, yaitu sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci, tidak mau mengabaikan hal-hal sepele; (8) *destiny*, yaitu bertanggungjawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai; (9) *dollars*, yaitu mengutamakan mencapai kekayaan sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya, dengan asumsi jika sukses menjalankan bisnisnya maka ia layak memperoleh keuntungan; dan (10) *distribusi*, yaitu bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaan, yaitu orang-orang kritis dan mau untuk diajak untuk mencapai sukses dalam bisnis yang dikelolanya (Alma, 2002:49)

Untuk menghadapi persaingan yang semakin kuat dan semakin menyempitnya lapangan pekerjaan maka sektor yang paling mungkin meningkatkan kesejahteraan hidup adalah menanamkan sikap atau jiwa kewirausahaan. Proses pemahaman sikap ini bukan hanya pada pebisnis, tetapi juga bagi kepala sekolah untuk memajukan usaha sekolah dari segi pengembangan pendidikan vokasi. Penanaman jiwa wirausaha ini tentu dapat dilakukan melalui jalur pendidikan baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi.

Dengan modal keterampilan secara akademik tersebut yang telah diperoleh melalui proses pendidikan, mereka terjun dilapangan dengan keberanian mengambil resiko, dan meraih keuntungan. Jika ada tanda-tanda para kepala sekolah tersebut dalam memimpin sekolah ada kemajuan yang berarti, maka pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dimana sekolah itu berada memfasilitasi baik berupa perijinan mengembangkan kreativitas dan inovasi, maupun kredit dari pemerintah yang memungkinkan untuk itu, guna mendorong peningkatan kualitas sekolah sebagaimana yang ditargetkan. Hal ini penting sebagai upaya investasi sumberdaya manusia dan juga mensejahterakan masyarakat melalui jalur pendidikan. Semakin baik keterampilan dan kemampuan yang diperoleh siswa dari hasil pelayanan belajar, maka semakin baik pula kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

2. Program Studi Pendidikan Tata Busana Dalam Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan.

Para pemegang kebijakan, para dosen, dan aparat terkait didalam mengelola program studi pendidikan tata busana diperlukan adanya kordinasi, integrasi dalam mengelola dan pola pikir implementasi penyelenggaraan pendidikan program studi ini. Perancangan pengembangan kurikulum yang dilakukan harus berdasarkan peninjauan atau kebutuhan dilapangan khususnya tentang kurikulum kejuruan, agar lulusan dapat bekerja sesuai harapan para pengguna. Implementasi kurikulum akan menjadi tanggung jawab para dosen di program studi , yang berarti para dosen perlu menterjemahkan, mengembangkan secara luas dan mendalam apa yang tertuang dalam kurikulum

khususnya dalam mengembangkan deskripsi dan silabus ke dalam satuan acara perkuliahan dan bahan ajar mengarah pada kewirausahaan.

Dalam proses implementasi kurikulum program studi yang dimaksud tidak terlepas dari kiprah para dosen/pendidik di pendidikan tinggi. khususnya dosen pada program studi pendidikan tata busana, perlu mengantarkan para lulusan agar menjadi lulusan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tidak boleh diabaikan sesuai tuntutan standar nasional pendidikan, yaitu antara lain pendidikan berdasarkan standar kompetensi. Mempersiapkan tenaga pendidik bidang busana, khususnya di sekolah menengah kejuruan (SMK) kelompok pariwisata yang memenuhi standar nasional pendidikan memiliki fungsi dasar untuk mencapai pendidikan nasional yang berkualitas, seperti yang tertuang dalam BAB II Pasal 3 yang berbunyi “standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Perencanaan pendidikan yang berkualitas akan dimulai dari bagaimana kurikulum dikembangkan, dan terpenting bagaimana implementasinya. Program Studi Pendidikan Tata Busana harus menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan pendidikan yang profesional sesuai Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen bab I pasal 11 ayat (1) yang telah dikemukakan terdahulu yang intinya bahwa guru itu harus sebagai pendidik yang profesional. Pendidik yang profesional tersebut harus ditunjukkan dengan sertifikat pendidik, dan sertifikat pendidik itu yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang terakreditasi.

Guru jurusan tata busana di SMK kelompok pariwisata ini dihasilkan dari Program Studi Pendidikan Tata Busana, yang harus menjadi pendidik yang profesional. Pendidik yang profesional sebagai kompetensi yang telah tercantum pada bab VI pasal 28 ayat (3) di lengkapi dengan kompetensi yang lain yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Dalam kaitan dengan memenuhi kompetensi pedagogic berarti program studi, yang dalam hal ini pimpinan beserta para dosennya untuk merancang tentang bagaimana proses yang perlu dilakukan agar para lulusan yang akan menjadi guru SMK, khususnya guru SMK pariwisata bidang busana siap menyampaikan materi keahlian atau menguasai tentang pembelajaran yang harus dilakukan. Para mahasiswa dalam Program Studi Pendidikan Tata Busana harus dibimbing, dimotivasi, diarahkan, dibina, dilatih dididik untuk dapat menguasai proses pembelajaran peserta didik dalam menyampaikan materi keahlian bidang busana. Mahasiswa tersebut harus dibekali bagaimana mereka kelak dapat merancang dan melakukan proses pembelajaran sampai dengan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Proses pembelajaran yang dilakukan dosen perlu memilih metode pembelajaran yang tepat dengan pokok bahasan yang akan dibahas dan sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berbagai metode pembelajaran dapat dipilih, dan bervariasi sehingga mahasiswa tidak merasa jenuh dan membosankan, seperti metode ceramah divariasikan dengan response, diskusi kelas atau kelompok, metode proyek, karya wisata, demonstrasi, pemberian tugas, pelatihan, juga dilengkapi berbagai media bahkan multimedia. Untuk menguasai kompetensi pedagogik ini mereka juga dilatih untuk praktik mengajar di sekolah – sekolah khususnya di SMK kelompok pariwisata yang difokuskan untuk bidang busana.

Pembekalan materi bidang busana termasuk di dalamnya teori busana, mendesain busana, Pembuatan pola konstruksi dan pola standar serta pola jadi dari anak sampai dewasa untuk laki – laki maupun perempuan, termasuk busana butik, konfeksi, dan menghias busana atau lenan rumah tangga. Untuk lebih mendapat keahlian khusus lagi atau lebih profesional yang lebih mendalam, para mahasiswa dapat memilih paket, seperti paket butik, paket garmen, paket desain mode, paket kriya, paket rias, yang di dalamnya masing – masing paket ada manajemen bisnis, agar para mahasiswa kelak dapat membimbing peserta didik berwirausaha disamping dapat bekerja pada usaha orang lain.

Guru SMK perlu dibekali agar memiliki kompetensi kepribadian, yang dalam pelaksanaannya tidak harus membekali secara terpisah dari mata – mata kuliah yang dirancang, tetapi untuk mencapai kompetensi kepribadian secara bertahap masuk pada setiap proses pembelajaran setiap mata kuliah, di samping dalam mata – mata kuliah kependidikan dan atau psikologi kependidikan. Dalam kurikulum termasuk dalam hidden curriculum yaitu kurikulum terselubung atau tersembunyi. Jadi setiap dosen harus merancang agar para lulusan kelak dapat memiliki kompetensi kepribadian, yaitu menjadi seorang pendidik yang bersifat dewasa, berwibawa, arif, bijaksana, dapat menguasai emosi dan dapat menjadi teladan bagi para peserta didik dan masyarakat lingkungannya.

Untuk menyiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi profesional berarti dibekali segala sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya tentang lingkup bidang busana secara luas dan mendalam, agar terintegrasi, khususnya antara kompetensi pedagogic dan kompetensi profesional pada diri lulusan. Selanjutnya dilengkapi dengan pembekalan untuk pencapaian kompetensi sosial.

Mahasiswa sebagai calon pendidik perlu disiapkan agar mereka juga peduli pada masyarakat yang dihadapinya dan lingkungannya. Masyarakat yang dihadapinya sebagai pendidik adalah peserta didik dalam usia remaja, yang masih labil untuk mencari identitas diri, maka para mahasiswa sebagai calon pendidik perlu mengenal bagaimana kelak ia harus menghadapi mereka dalam kelas, di luar kelas sehingga mereka akan termotivasi, dan sadar untuk belajar dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat, bangsa dan Negara. Disamping itu perlu menyiapkan diri jika diperlukan untuk dapat berkomunikasi dengan orangtua/wali peserta didik sehingga tidak mengecewakan mereka. Juga guru sebagai pendidik dapat berkomunikasi dengan teman seperjuangan di sekolah untuk diskusi, sharing, memecahkan masalah pendidikan yang dimungkinkan muncul, disamping dapat bergaul secara positif sebagai pribadi.

Kompetensi profesional sebagai pendidik menurut Charles F. Johnson (Abin Syamsuddin, 1996 : 78) dikemukakan kompetensi yang harus dimiliki pendidik ada 6 unsur:

1. Komponen kinerja (*Performance Component*) penampilan dari figur dibawah dapat terlihat sebagai puncak dari kegiatan kerja, dalam hal ini proses pembelajaran komponen kinerja ini terdiri dari beberapa perilaku yang sedang ditampilkan yang merupakan totalitas dari : pengetahuan, keterampilan dan proses.
2. Komponen bahan pengajaran (*Reaching Subject Component*); komponen bahan pengajaran adalah kumpulan ilmu-ilmu pengetahuan yang yang digabungkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi, komponen ini berupa gagasan, fakta-fakta, nilai-nilai, proses atau keterampilan yang mana pengajar berusaha membantu siswa unruk memperolehnya.
3. Komponen proses pengajaran (*teaching process component*) komponen penyesuaian berisi pemikiran elemen pengolahan (proses pembelajaran) yang memungkinkan pelaksanaan dari kompetensi komponen proses digunakan sebagai suatu acuan bagi kelompok teknik-teknik manusiawi yang mana kita memproduksi gagasan, menciptakan gagasan-gagasan, strategi-strategi, membuat keputusan dan mengevaluasi kemajuan hasil pembelajaran.
4. Komponen penyesuaian pribadi (*the profesional adjusment component*) komponen penyesuaian berisi elemen-elemen dasar penting terhadap penyesuaian individu pendidik dan karakteristik pribadinya ke arah penampilan kerja sesuai dengan kompetensinya. Penyesuaian untuk mempraktekkan keahliannya atau sikap mereka dan berupaya memperkecil atau mengurangi kelemahan atau kealfaan yang tidak sesuai dengan penampilan kompetensi lebih jauh lagi penyesuaian menghendaki penampilan kerja yang kreatif.
5. Komponen profesional pengajaran (*The teaching profesional component*) komponen profesional meliputi batasan, fakta, prinsip-prinsip, keterampilan-keterampilan dan proses yang digabungkan dalam profesi pendidikan. Komponen profesional merupakan sumber dasar yang merupakan kumpulan informasi teori dan praktisi dalam dunia pendidikan seperti: psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, sosiologi pendidikan, filsafat pendidikan, kurikulum, test dan pengukuran, manajemen pembelajaran, media pendidikan, dan lain sebagainya.
6. Komponen sikap (*Attitude component*) komponen sikap berisi sari pati elemen-elemen sikap, nilai dan perasaan yang penting bagi dasar semua kompetensi pengajar/pendidik. Dengan adanya sikap positif terhadap sesuatu hal, akan terjadi perbuatan, dan kompetensi akan dapat dilaksanakan.

Dalam mencapai kompetensi sebagai agen pembelajaran perlu dilakukan kerjasama dengan asosiasi terkait yang sesuai dengan bidang keahlian, karena dapat menerjunkan dosen atau mahasiswa untuk mendapat keahlian yang lebih mendalam dan luas. Untuk bidang keahlian tata busana tentu dapat dicari asosiasi keahlian yang relevan, misalnya asosiasi atau ikatan perancang busana, ikatan penata busana, yang dapat memungkinkan untuk menyelenggarakan pelatihan yang diikuti untuk memperkuat profesi sebagai pendidik di bidang busana, dalam kaitannya dengan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi seperti tertuang pada Bab XIV Pasal 89 ayat (5) bahwa :

Sertifikasi kompetensi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus ujian kompetensi.

Jadi untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi perlu dicari, dijaring asosiasi yang sudah terakreditasi yang dapat dilakukan oleh program studi, yang dalam hal ini program studi pendidikan tata busana. Juga diperlukan untuk membekali wawasan mahasiswa yang akan menjadi tenaga pendidik agar mereka juga jika suatu saat setelah mereka lulus dan bekerja menjadi pendidik atau sebagai wirausaha dapat memiliki gambaran dan pengalaman kerja di industri yang terkait seperti butik, sanggar busana, garmen, lembaga konsultan mode, *adversiting* bidang busana.

Dalam kaitan memberikan pengalaman di industri busana dapat dibuat MOU agar tidak sulit menempatkan mahasiswa di lembaga-lembaga usaha tersebut. Upaya yang dilakukan perlu penjangkauan terlebih dahulu, melakukan pendekatan, melakukan kerja sama yang *simbiosis mutualism* sehingga akan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Upaya ini tentu memerlukan keuletan, keahlian dari dosen untuk memberikan peluang-peluang yang dapat dilakukan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang Peran LPTK dalam Pengembangan Pendidikan Tata Busana di Indonesia dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut :

1. Peran LPTK sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan kewirausahaan bidang tata busana yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi manajerial dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan kewirausahaan,
2. Kewirausahaan dalam bidang tata busana, merupakan implementasi kurikulum yang menjadi tanggung jawab para dosen di program studi pendidikan tata busana, mengantar para lulusan yang dapat beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan persaingan globalisasi.
3. Guru jurusan tata busana di SMK kelompok tata busana dihasilkan dari program studi pendidikan tata busana yang harus menjadi tenaga pendidik yang memiliki kompetensi profesional.
4. Upaya untuk pengembangan pendidikan vokasi (Pendidikan kejuruan), tugas guru adalah mempersiapkan peserta didik agar mereka secara mental siap kerja, memiliki mental kewirausahaan yaitu memiliki motivasi pengembangan diri, maju, dapat membuat keputusan yang tepat, berani mengambil resiko, jujur, ulet dan teliti.
5. Para peserta didik diharapkan out put yang dapat berwira usaha sesuai keahlian khusus, profesional dalam manajemen usaha busana, antara lain, usaha butik, konfeksi tailoring, tat arias, yang membuka lapangan kerja bagi orang lain.

Daftar Pustaka

- Alma, B. 2002. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2004. *Kurikulum dan GBPP SMK Tahun 2004*. Jakarta: Dirjendikdasmen.
- Hamalik, O. 2006. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parker, Frances J. *Home Economics An Introduction to a Dynamics Profession*. New York: Macmillan Publishing Co. Inc.
- Prasetya Irawan, Suciati, dan I.G.A.K.Wardani. 1996. *Teori Belajar, motivasi, dan keterampilan Mengajar*. Program Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) Untuk Dosen Muda. Jakarta: Bagian Proyek Persiapan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Sagala Syaiful, 2008. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta
- Tilaar, H.A.R. 2005. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tjipto Utomo dan Kees Ruijter. 1985. *Peningkatan Dan Pengembangan Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

Wirawan, 2001. *Pendidikan Jiwa Kewirausahaan Strategi Pendidikan Nasional Dalam Globalisasi Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Hamka Press.

